KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303/M/2024 TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112):
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan

Menteri ini.

KEDUA: Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

a. referensi arsitektur; dan

b. domain arsitektur.

KETIGA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya, NADIEM ANWAR MAKARIM

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

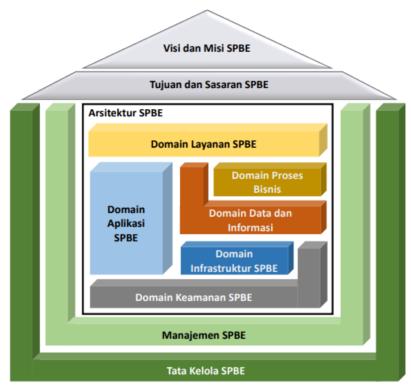
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303/M/2024
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BAB I KERANGKA KERJA

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu. Unsurunsur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dimaksud meliputi: 1) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3) Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4) Proses Bisnis; 5) Data dan Informasi; 6) Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7) Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 8) Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 9) Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Keterpaduan seluruh unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat diwujudkan dalam sebuah Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya memuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kerangka Kerja Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kedudukannya dalam Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Kerja Arsitektur Nasional (Perpres Nomor 132 Tahun 2022)

Salah satu komponen utama pada Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu serta menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

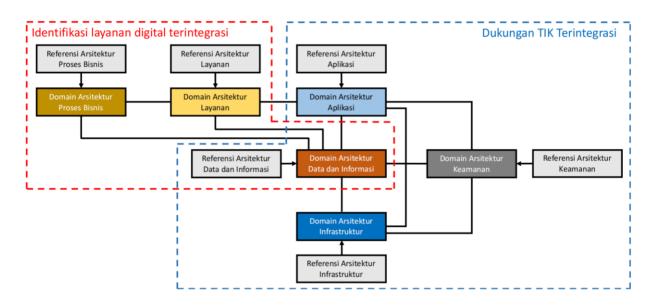
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan panduan dalam tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik. Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggambarkan secara terpadu seluruh domain di dalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan.

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dimulai dengan melakukan identifikasi layanan digital terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Proses identifikasi layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi didasarkan pada rumusan proses bisnis Kementerian sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya dukungan aspek teknologi informasi dan komunikasi diidentifikasi melalui domain aplikasi sistem

pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk melakukan identifikasi pada setiap domain terdapat struktur bertingkat yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut dengan Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan semua domain arsitekturnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Domain dalam Kerangka Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Gambar di atas mengilustrasikan relasi antar domain dalam kerangka kerja arsitektur melalui pengelompokan kegiatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).

Dengan penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta memperkuat keamanan informasi, menerapkan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi dan standardisasi kualitas layanan digital nasional (Service Level Agreement), berbagi data dan informasi sesuai dengan kebijakan Satu Data memudahkan Indonesia, integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru, serta perencanaan meningkatkan keselarasan dan penganggaran pemerintahan berbasis elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu Referensi Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Referensi Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Referensi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

A. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 2.1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu:

- 1. sektor pemerintahan, mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2. urusan pemerintahan, menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 3. fungsi pemerintahan, menjelaskan lebih terperinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendefinisikan dan mengusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional. Hasil validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas usulan tersebut ditetapkan menjadi struktur referensi arsitektur tingkat 3 (ketiga); dan

4. subfungsi pemerintahan, menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Dalam struktur ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun referensi sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Tabel 2.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RAB-Tingkat 1	RAB-Tingkat 2	RAB-Tingkat 3	RAB-Tingkat 4
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB.06.01.01.01 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kerja			RAB.06.01.01.02 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal
			RAB.06.01.01.03 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
		RAB.06.01.02 Pengelolaan Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini,	RAB.06.01.02.01 Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
		Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	RAB.06.01.02.02 Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAB.06.01.02.03 Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		RAB.06.01.03 Pengelolaan Pendidikan Non Formal	RAB.06.01.03.01 Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal
			RAB.06.01.03.02 Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal
			RAB.06.01.03.03 Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal
		RAB.06.01.04 Pengelolaan Pendidikan Tinggi	RAB.06.01.04.01 Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan tinggi
			RAB.06.01.04.02 Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi

RAB-Tingkat 1	RAB-Tingkat 2	RAB-Tingkat 3	RAB-Tingkat 4
RAB.06 Pendidikan	RAB.06.01 Pendidikan	_	RAB.06.01.04.03 Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
dan Tenaga Kerja			RAB.06.01.04.04 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
			RAB.06.01.04.05 Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi
		RAB.06.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Substansi	RAB.06.01.05.01 Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan
		Pendidikan	RAB.06.01.05.02 Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional
			RAB.06.01.05.03 Pengelolaan Konten Digital Pendidikan
		RAB.06.01.06 Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan	RAB.06.01.06.01 Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
			RAB.06.01.06.02 Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAB.06.01.06.03 Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAB.06.01.06.04 Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi
RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.01 Pengelolaan Bidang Kebudayaan	RAB.08.02.01.01 Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
			RAB.08.02.01.02 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

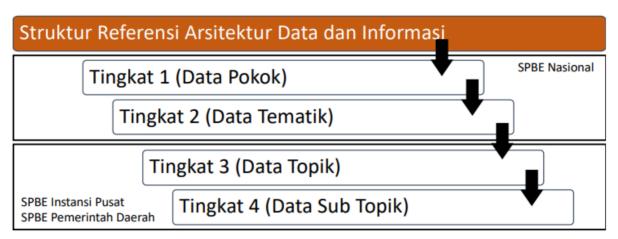
RAB-Tingkat 1	RAB-Tingkat 2	RAB-Tingkat 3	RAB-Tingkat 4
			RAB.08.02.01.03 Pengelolaan Lembaga Kebudayaan
RAB.08. Budaya dan	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan	RAB.08.02.02.01 Pengelolaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Agama		Kesastraan	RAB.08.02.02.02 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan
			RAB.08.02.02.03 Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan
RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	RAB.09.02.03.01 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.02.04 Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	RAB.09.02.04.01 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	RAB.09.02.06.01 Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran	RAB.09.02.07.01 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran
		RAB.09.02.08 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	RAB.09.02.08.01 Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		RAB.09.02.09 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	RAB.09.02.09.01 Pengelolaan Revisi Anggaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
		RAB.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAB.09.02.11.01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAB-Tingkat 1	RAB-Tingkat 2	RAB-Tingkat 3	RAB-Tingkat 4
	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	RAB.09.03.01.01 Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RAB.09. Pemerintahan	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat	RAB.09.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Umum		Informatika	RAB.09.03.01.03 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
			RAB.09.03.01.04 Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		RAB.09.03.02 Penatakelolaan Aplikasi Informatika	RAB.09.03.02.01 Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAB.09.03.02.02 Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan
			RAB.09.03.02.03 Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan
			RAB.09.03.02.04 Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan
		RAB.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.03.01 Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan
			RAB.09.03.03.02 Penyebarluasan Data dan Informasi Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
		RAB.09.03.04 Pengelolaan Data Statistik	RAB.09.03.04.01 Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
			RAB.09.03.04.02 Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
			RAB.09.03.04.03 Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan

RAB-Tingkat 1	RAB-Tingkat 2	RAB-Tingkat 3	RAB-Tingkat 4
	RAB.09.04 Komunikasi	RAB.09.04.02 Pengelolaan Komunikasi Publik	RAB.09.04.02.01 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
RAB.09. Pemerintahan	RAB.09.05 Perencanaan	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan	RAB.09.05.01.01 Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Umum	Pembangunan Nasional		RAB.09.05.01.02 Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.05.02 Penganggaran Pembangunan	RAB.09.05.02.01 Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana	RAB.09.06.01.01 Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.06.02 Penataan Sistem Kelembagaan	RAB.09.06.02.01 Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	RAB.09.06.03.01 Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	RAB.09.06.04.01 Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAB.09.06.04.02 Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAB.09.06.04.03 Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.06.05 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	RAB.09.06.05.01 Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

RAB-Tingkat 1	RAB-Tingkat 2	RAB-Tingkat 3	RAB-Tingkat 4
			RAB.09.06.05.02 Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan
RAB.09. Pemerintahan	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	RAB.09.06.05.03 Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan
Umum		RAB.09.06.06 Penyelenggaraan Kearsipan	RAB.09.06.06.01 Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	RAB.09.07 Kesekretariatan	RAB.09.07.02 Pengelolaan Bidang Hukum	RAB.09.07.02.01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan
			RAB.09.07.02.02 Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAB.09.07.03 Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	RAB.09.07.03.01 Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Negeri
			RAB.09.07.03.02 Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Luar Negeri
		RAB.09.07.05 Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Keprotokolan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	RAB.09.07.05.01 Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAB.09.07.05.02 Pengelolaan Keprotokolan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

B. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 2.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu:

- 1. data pokok, mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2. data tematik, menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 3. data topik, menjelaskan lebih terperinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga). Data topik didefinisikan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi struktur referensi arsitektur tingkat 3 (ketiga), berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- 4. data sub topik, menjelaskan lebih terperinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Dalam struktur ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun referensi sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Tabel 2.2 Referensi Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	8	RAD.06.01.01.01 Data Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAD.06.01.01.02 Data Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal
			RAD.06.01.01.03 Data Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
		RAD.06.01.02 Data Pengelolaan Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan	RAD.06.01.02.01 Data Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
		Pendidikan Menengah	RAD.06.01.02.02 Data Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		RAD.06.01.03 Data Pengelolaan Pendidikan Non Formal	RAD.06.01.02.03 Data Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAD.06.01.03.01 Data Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal
			RAD.06.01.03.02 Data Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4
RAD.06 Informasi Pendidikan dan	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.03 Data Pengelolaan Pendidikan Non Formal	RAD.06.01.03.03 Data Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal
Tenaga Kerja		RAD.06.01.04 Data Pengelolaan Pendidikan Tinggi	RAD.06.01.04.01 Data Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAD.06.01.04.02 Data Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi
			RAD.06.01.04.03 Data Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAD.06.01.04.04 Data Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
			RAD.06.01.04.05 Data Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi
		RAD.06.01.05 Data Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan RAD.06.01.06 Data Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Satuan Pendidikan	RAD.06.01.05.01 Data Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan
			RAD.06.01.05.02 Data Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional
			RAD.06.01.05.03 Data Pengelolaan Konten Digital Pendidikan
			RAD.06.01.06.01 Data Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4
RAD.06 Informasi Pendidikan dan	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.06 Data Pengelolaan Penjaminan Mutu dan	RAD.06.01.06.02 Data Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
Tenaga Kerja		Akreditasi Satuan Pendidikan	RAD.06.01.06.03 Data Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAD.06.01.06.04 Data Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi
RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.01 Data Pengelolaan Bidang Kebudayaan	RAD.08.02.01.01 Data Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
ngama			RAD.08.02.01.02 Data Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
			RAD.08.02.01.03 Data Pengelolaan Lembaga Kebudayaan
		RAD.08.02.02 Data Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	RAD.08.02.02.01 Data Pengelolaan Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
			RAD.08.02.02.02 Data Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan
			RAD.08.02.02.03 Data Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan
RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Data Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	RAD.09.02.03.01 Data Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4	
RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.04 Data Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	RAD.09.02.04.01 Data Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		RAD.09.02.06 Data Pengelolaan Kekayaan Negara	RAD.09.02.06.01 Data Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		RAD.09.02.07 Data Monitoring dan Evaluasi Anggaran	RAD.09.02.07.01 Data Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran	
		RAD.09.02.08 Data Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	RAD.09.02.08.01 Data Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
	RAD.09.03 Data Informasi		RAD.09.02.09 Data Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	RAD.09.02.09.01 Data Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran
		RAD.09.02.11 Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAB.09.02.11.01 Data Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		8	RAD.09.03.01.01 Data Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
			RAD.09.03.01.02 Data Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	
			RAD.09.03.01.03 Data Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	

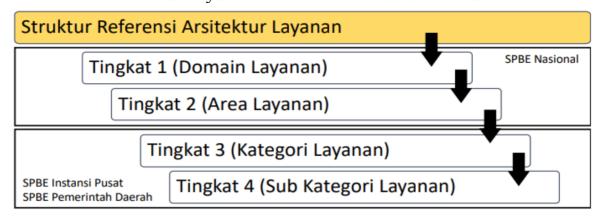
RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4	
RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.01 Data Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	RAD.09.03.01.04 Data Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		RAD.09.03.02 Data Penatakelolaan Aplikasi Informatika	RAD.09.03.02.01 Data Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
			RAD.09.03.02.02 Data Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan	
			RAD.09.03.02.03 Data Pengelolaan Akun Akses Laya Kebudayaan	RAD.09.03.02.03 Data Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan
			RAD.09.03.02.04 Data Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan	
		RAD.09.03.03 Data Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03.03.01 Data Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan	
			RAD.09.03.03.02 Data Penyebarluasan Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
		RAD.09.03.04 Pengelolaan Data Statistik	RAD.09.03.04.01 Data Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
			RAD.09.03.04.02 Data Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
			RAD.09.03.04.03 Data Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4
RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	RAD.09.04.02 Data Pengelolaan Komunikasi Publik	RAD.09.04.02.01 Data Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01 Data Perencanaan Pembangunan	RAD.09.05.01.01 Data Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAD.09.05.01.02 Data Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAD.09.05.02 Data Penganggaran Pembangunan	RAD.09.05.02.01 Data Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	RAD.09.06 Data Aparatur Negara		RAD.09.06.01.01 Data Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAD.09.06.02 Data Penataan Sistem Kelembagaan	RAD.09.06.02.01 Data Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAD.09.06.03 Data Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	RAD.09.06.03.01 Data Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4
		RAD.09.06.04 Data Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09.06.04.01 Data Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	8	RAD.09.06.04.02 Data Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAD.09.06.04.03 Data Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAD.09.06.05 Data Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	RAD.09.06.05.01 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
			RAD.09.06.05.02 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan
			RAD.09.06.05.03 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan
		RAD.09.06.06 Data Penyelenggaraan Kearsipan	RAD.09.06.06.01 Data Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAD-Tingkat 1	RAD-Tingkat 2	RAD-Tingkat 3	RAD-Tingkat 4
	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	esekretariatan Bidang Hukum	RAD.09.07.02.01 Data Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
			RAD.09.07.02.02 Data Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	ekretariatan Penyelenggaraan Koordinasi	RAD.09.07.03.01 Data Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Negeri
			RAD.09.07.03.02 Data Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Luar Negeri
			RAD.09.07.05.01 Data Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAD.09.07.05.02 Data Pengelolaan Keprotokolan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

C. Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 2.3 Struktur Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Struktur Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam domain arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- 1. domain layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2. area layanan, menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 3. kategori layanan, menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, didefinisikan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- 4. subkategori layanan, menjelaskan lebih terperinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Dalam struktur ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun referensi sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Tabel 2.3 Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan		RAL.01.31.01.01 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAL.01.31.01.02 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal
			RAL.01.31.01.03 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
		RAL.01.31.02 Layanan Pengelolaan Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini,	RAL.01.31.02.01 Layanan Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
		Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	RAL.01.31.02.02 Layanan Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAL.01.31.02.03 Layanan Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
		RAL.01.31.03 Layanan Pengelolaan Pendidikan Non Formal	RAL.01.31.03.01 Layanan Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL.01.31.03 Layanan Pengelolaan Pendidikan Non Formal	RAL.01.31.03.02 Layanan Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal
			RAL.01.31.03.03 Layanan Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal
		RAL.01.31.04 Layanan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	RAL.01.31.04.01 Layanan Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAL.01.31.04.02 Layanan Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi
			RAL.01.31.04.03 Layanan Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAL.01.31.04.04 Layanan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
			RAL.01.31.04.05 Layanan Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi
		RAL.01.31.05 Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan	RAL.01.31.05.01 Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan
			RAL.01.31.05.02 Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional
			RAL.01.31.05.03 Layanan Pengelolaan Konten Digital Pendidikan

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL.01.31.06 Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan	RAL.01.31.06.01 Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
			RAL.01.31.06.02 Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAL.01.31.06.03 Layanan Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAL.01.31.06.04 Layanan Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi
	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.01 Layanan Pengelolaan Bidang Kebudayaan	RAL.01.42.01.01 Layanan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
			RAL.01.42.01.02 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
			RAL.01.42.01.03 Layanan Pengelolaan Lembaga Kebudayaan
		RAL.01.42.02 Layanan Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan	RAL.01.42.02.01 Layanan Pengelolaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
		Kesastraan	dan Sastra
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL.01.42.02 Layanan Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan	RAL.01.42.02.02 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan
		Kesastraan	RAL.01.42.02.03 Layanan Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan
	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Layanan Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	RAL.01.43.01.01 Layanan Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAL.01.43.01.02 Layanan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
			RAL.01.43.01.03 Layanan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
			RAL.01.43.01.04 Layanan Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		RAL.01.43.02 Layanan Penatakelolaan Aplikasi Informatika	RAL.01.43.02.01 Layanan Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAL.01.43.02.02 Layanan Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan
			RAL.01.43.02.03 Layanan Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan

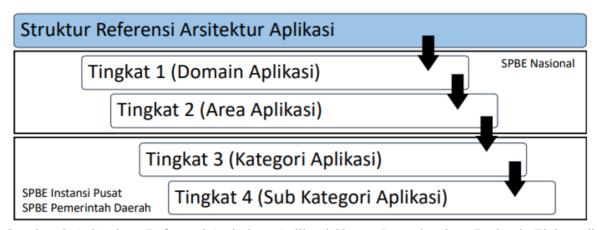
RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
			RAL.01.43.02.04 Layanan Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Layanan Pengelolaan Informasi Publik	RAL.01.43.03.01 Layanan Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan
			RAL.01.43.03.02 Layanan Penyebarluasan Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
		RAL.01.43.04 Layanan Pengelolaan Data Statistik	RAL.01.43.04.01 Layanan Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
			RAL.01.43.04.02 Layanan Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
			RAL.01.43.04.03 Layanan Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
	RAL.01.44 Komunikasi	RAL.01.44.02 Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik	RAL.01.44.02.01 Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.03 Layanan Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	RAL.02.02.03.01 Layanan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAL.02.02.04 Layanan Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	RAL.02.02.04.01 Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAL.02.02.06 Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara	RAL.02.02.06.01 Layanan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
		RAL.02.02.07 Layanan Monitoring dan Evaluasi Anggaran	RAL.02.02.07.01 Layanan Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.08 Layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	RAL.02.02.08.01 Layanan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
remermanan		RAL.02.02.09 Layanan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	RAL.02.02.09.01 Layanan Pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran
		RAL.02.02.11 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAL.02.02.11.01 Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.01 Layanan Perencanaan Pembangunan	RAL.02.03.01.01 Layanan Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAL.02.03.01.02 Layanan Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAL.02.03.02 Layanan Penganggaran Pembangunan	RAL.02.03.02.01 Layanan Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Layanan Penataan Sistem Tata Laksana	RAL.02.04.01.01 Layanan Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
		RAL.02.04.02 Layanan Penataan Sistem Kelembagaan	RAL.02.04.02.01 Layanan Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.03 Layanan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	RAL.02.04.03.01 Layanan Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAL.02.04.04 Layanan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	RAL.02.04.04.01 Layanan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAL.02.04.04.02 Layanan Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAL.02.04.04.03 Layanan Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAL.02.04.05 Layanan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	RAL.02.04.05.01 Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
			RAL.02.04.05.02 Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan
			RAL.02.04.05.03 Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan

RAL-Tingkat 1	RAL-Tingkat 2	RAL-Tingkat 3	RAL-Tingkat 4
			Kesastraan
		RAL.02.04.06 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	RAL.02.04.06.01 Layanan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.05 Kesekretariatan	RAL.02.05.02 Layanan Pengelolaan Bidang Hukum	RAL.02.05.02.01 Layanan Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
Pemerintahan	Negara		RAL.02.05.02.02 Layanan Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAL.02.05.03 Layanan Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	RAL.02.05.03.01 Layanan Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Negeri
			RAL.02.05.03.02 Layanan Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Luar Negeri
		RAL.02.05.05 Layanan Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Keprotokolan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	RAL.02.05.05.01 Layanan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAL.02.05.05.02 Layanan Pengelolaan Keprotokolan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

D. Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 2.4 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam domain arsitektur aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ke dalam tingkatan struktur Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- 1. domain aplikasi, mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2. area aplikasi, menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 3. kategori aplikasi, menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- 4. subkategori aplikasi, menjelaskan lebih terperinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada struktur ini menyusun referensi sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Tabel 2.4 Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	RAA.01.01.01 Komponen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAA.01.01.01.01 Subkomponen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.01.02 Komponen Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	RAA.01.01.02.01 Subkomponen Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.01.03 Komponen Peningkatan Kualitas	RAA.01.01.03.01 Subkomponen Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
		Pelayanan Publik	RAA.01.01.03.02 Subkomponen Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan
			RAA.01.01.03.03 Subkomponen Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan
	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.01 Komponen Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	RAA.01.02.01.01 Subkomponen Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.02 Komponen Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	RAA.01.02.02.01 Subkomponen Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.03 Komponen Pengelolaan Kekayaan Negara	RAA.01.02.03.01 Subkomponen Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4	
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.04 Komponen Monitoring dan Evaluasi Anggaran	RAA.01.02.04.01 Subkomponen Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran	
	remermanan	RAA.01.02.05 Komponen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	RAA.01.02.05.01 Subkomponen Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
		RAA.01.02.06 Komponen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	RAA.01.02.06.01 Subkomponen Pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	
		RAA.01.02.07 Komponen Perencanaan Pembangunan	RAA.01.02.07.01 Subkomponen Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
				RAA.01.02.07.02 Subkomponen Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.08 Komponen Penganggaran Pembangunan	RAA.01.02.08.01 Subkomponen Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
			RAA.01.02.09 Komponen Penataan Sistem Tata Laksana	RAA.01.02.09.01 Subkomponen Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.10 Komponen Penataan Sistem Kelembagaan	RAA.01.02.10.01 Subkomponen Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.11 Komponen Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	RAA.01.02.11.01 Subkomponen Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAA.01.02.11.02 Subkomponen Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAA.01.02.11.03 Subkomponen Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.12 Komponen Penyelenggaraan Kearsipan	RAA.01.02.12.01 Subkomponen Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.13 Komponen Pengelolaan Bidang Hukum	RAA.01.02.13.01 Subkomponen Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
			RAA.01.02.13.02 Subkomponen Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.14 Komponen Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	RAA.01.02.14.01 Subkomponen Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Negeri
			RAA.01.02.14.02 Subkomponen Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Luar Negeri

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.15 Komponen Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Keprotokolan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	RAA.01.02.15.01 Subkomponen Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAA.01.02.15.02 Subkomponen Pengelolaan Keprotokolan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		RAA.01.02.16 Komponen Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	RAA.01.02.16.01 Subkomponen Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAA.01.02.16.02 Subkomponen Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
			RAA.01.02.16.03 Subkomponen Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
			RAA.01.02.16.04 Subkomponen Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		RAA.01.02.17 Komponen Penatakelolaan Aplikasi Informatika	RAA.01.02.17.01 Subkomponen Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			RAA.01.02.17.02 Subkomponen Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan
			RAA.01.02.17.03 Subkomponen Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi	RAA.01.02.17 Komponen Penatakelolaan Aplikasi Informatika	RAA.01.02.17.04 Subkomponen Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan
	Pemerintahan	RAA.01.02.18 Komponen Pengelolaan Informasi Publik	RAA.01.02.18.01 Subkomponen Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan
			RAA.01.02.18.02 Subkomponen Penyebarluasan Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
		RAA.01.02.19 Komponen Pengelolaan Data Statistik	RAA.01.02.19.01 Subkomponen Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
			RAA.01.02.19.02 Subkomponen Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
			RAA.01.02.19.03 Subkomponen Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan
		RAA.01.02.20 Komponen Pengelolaan Komunikasi Publik	RAA.01.02.20.01 Subkomponen Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	RAA.02.01.01 Komponen Pengelolaan Isu Strategis	RAA.02.01.01.01 Subkomponen Pengelolaan Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Penanganan Isu Strategis Bidang Kesehatan
			RAA.02.01.01.02 Subkomponen Pengelolaan Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Penanganan Isu Strategis Bidang Sosial

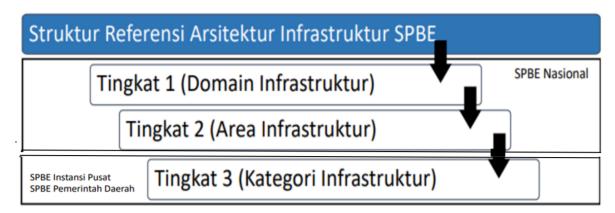
RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	RAA.02.01.01 Komponen Pengelolaan Isu Strategis	RAA.02.01.01.03 Subkomponen Pengelolaan Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Penanganan Isu Strategis Bidang Teknologi dan Informasi
			RAA.02.01.01.04 Subkomponen Pengelolaan Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Penanganan Isu Strategis Bidang Lainnya
	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	RAA.02.02.01 Komponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAA.02.02.01.01 Subkomponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAA.02.02.01.02 Subkomponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal
			RAA.02.02.01.03 Subkomponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi
		RAA.02.02.02 Komponen Pengelolaan Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak	RAA.02.02.01 Subkomponen Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
	Usia Dini, Pendidik dan Pendidikan Me		RAA.02.02.02 Subkomponen Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
			RAA.02.02.03 Subkomponen Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	RAA.02.02.03 Komponen Pengelolaan Pendidikan Non Formal	RAA.02.02.03.01 Subkomponen Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal
	reiteittu	Formar	RAA.02.02.03.02 Subkomponen Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal
			RAA.02.02.03.03 Subkomponen Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal
		RAA.02.02.04 Komponen Pengelolaan Pendidikan Tinggi	RAA.02.02.04.01 Subkomponen Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAA.02.02.04.02 Subkomponen Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi
			RAA.02.02.04.03 Subkomponen Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAA.02.02.04.04 Subkomponen Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
			RAA.02.02.04.05 Subkomponen Pengelolaan Riset, dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi
		RAA.02.02.05 Komponen Pengelolaan dan	RAA.02.02.05.01 Subkomponen Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
		Pengembangan Substansi Pendidikan	RAA.02.02.05.02 Subkomponen Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional
			RAA.02.02.05.03 Subkomponen Pengelolaan Konten Digital Pendidikan
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	RAA.02.02.06 Komponen Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan	RAA.02.02.06.01 Subkomponen Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal
			RAA.02.02.06.02 Subkomponen Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Tinggi
			RAA.02.02.06.03 Subkomponen Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
			RAA.02.02.06.04 Subkomponen Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi
		RAA.02.02.07 Komponen Pengelolaan Bidang	RAA.02.02.07.01 Subkomponen Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
		Kebudayaan	RAA.02.02.07.02 Subkomponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

RAA-Tingkat 1	RAA-Tingkat 2	RAA-Tingkat 3	RAA-Tingkat 4
			RAA.02.02.07.03 Subkomponen Pengelolaan Lembaga Kebudayaan
		RAA.02.02.08 Komponen Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	RAA.02.02.08.01 Subkomponen Pengelolaan Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
			RAA.02.02.08.02 Subkomponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	RAA.02.02.08 Komponen Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	RAA.02.02.08.03 Subkomponen Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan

E. Referensi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 2. 5 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam domain arsitektur infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik akan mendukung arah kebijakan nasional. Selanjutnya, substansi infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1. domain infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2. area infrastruktur, menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- 3. kategori infrastruktur, menjelaskan lebih terperinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga) yang menjadi struktur di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tabel 2.5 Referensi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RAI-Tingkat 1	RAI-Tingkat 2	RAI-Tingkat 3	
RAI.01. Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data Nasional	RAI.01.01.01 Pusat Data Instansi Pusat Pemerintah	
	RAI.01.02 Pusat Komputasi	RAI.01.02.01 Pusat Komputasi Onpremise	
		RAI.01.02.02 Pusat Komputasi Awan Pihak Ketiga	
		RAI.01.02.03 Fasilitas Komputasi	
	RAI.01.03 Pusat Kendali	RAI.01.03.01 Network Operations Center	
		RAI.01.03.02 Data Operation Center	
		RAI.01.03.03 Command/Operation Center	
		RAI.01.03.04 Security Operation Center	
		RAI.01.03.05 Emergency Operation Center	
RAI.02. Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra Pemerintah	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		RAI.02.01.02 Jaringan Internet Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		RAI.02.01.03 Perangkat Keras Jaringan	
	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Jaringan Intra Instansi Pemerintah	
	Layanan Pemerintah	RAI.02.02.02 Sistem Penghubung Layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		RAI.02.02.03 Interoperabilitas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

RAI-Tingkat 1	RAI-Tingkat 2	RAI-Tingkat 3
RAI.03. Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur	RAI.03.01.01 Perangkat Keras Keamanan
	dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Peripheral
	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur	RAI.03.01.03 Mobile Device
	dan Aplikasi	RAI.03.01.04 Perangkat Lunak Platform
	RAI.03.02 Komputasi Awan	RAI.03.02.01 Platform as a Service (PaaS)
		RAI.03.02.02 Infrastructure as a Service (IaaS)
		RAI.03.02.03 Software as a Service (SaaS)
		RAI.03.02.04 Big Data as a Service (BDaaS)

F. Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar 2.6 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan mendukung arah kebijakan nasional. Selanjutnya, substansi keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1. domain keamanan, mengelompokkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke dalam domain keamanan yang terdiri atas standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2. area keamanan, mengelompokkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- 3. kategori keamanan, menjelaskan lebih terperinci dari area keamanan sebagai tingkat 3 (ketiga) yang menjadi struktur di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tabel 2.6 Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RAK Tingkat 1	RAK Tingkat 2	RAK Tingkat 3				
RAK.01 Standar	RAK.01.01 Standar Teknis dan	RAK.01.01.01 Keamanan Data dan Informasi				
Keamanan	Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAK.01.01.02 Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
		RAK.01.01.03 Keamanan Sistem Penghubung Layanan				
		RAK.01.01.04 Keamanan Jaringan Intra				
		RAK.01.01.05 Keamanan Pusat Data Nasional				
		RAK.01.01.06 Sistem Manajemen Keamanan Informasi				
	RAK.01.02 Standar Keamanan Internasional	RAK.01.02.01 Referensi Standar Keamanan Internasional				
	RAK.01.03 Regulasi Lainnya	RAK.01.03.01 Regulasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi				
		RAK.01.03.02 Regulasi Pengelolaan Keamanan				
RAK.02 Penerapan	RAK.02.01 Edukasi Kesadaran	RAK.02.01.01 Sosialisasi Keamanan Informasi				
Keamanan	Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAK.02.01.02 Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi (Information Security Awareness)				
	RAK.02.02 Identifikasi Kerentanan	RAK.02.02.01 Penilaian Kerentanan dan Risiko Keamanan				
	Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAK.02.02.02 Pengujian Kerentanan dan Risiko Keamanan				
		RAK.02.02.03 Analisis Kerentanan dan Risiko Keamanan				
		RAK.02.02.04 Penanganan Kerentanan dan Risiko Keamanan				

RAK Tingkat 1	RAK Tingkat 2	RAK Tingkat 3
	RAK.02.03 Peningkatan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAK.02.03.01 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi
RAK.02 Penerapan Keamanan	RAK.02.03 Peningkatan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis	RAK.02.03.02 Peningkatan Teknologi Keamanan Informasi
	Elektronik	RAK.02.03.03 Penguatan Tata Kelola Keamanan Informasi
	RAK.02.04 Penanganan Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAK.02.04.01 Identifikasi Penanganan Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		RAK.02.04.02 Proteksi Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		RAK.02.04.03 Deteksi Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		RAK.02.04.04 Respon Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		RAK.02.04.05 Pemulihan Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	RAK.02.05 Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAK.02.05.01 Audit Keamanan Infrastruktur
		RAK.02.05.02 Audit Keamanan Aplikasi
		RAK.02.05.03 Evaluasi Tingkat Maturitas Penanganan Insiden

RAK Tingkat 1	RAK Tingkat 2	RAK Tingkat 3
RAK.03 Kelaikan	RAK.03.01 Kelaikan Keamanan	RAK.03.01.01 Pengujian Kerentanan Internal
Keamanan	Aplikasi Umum	RAK.03.01.02 Pengujian Kerentanan Eksternal
	RAK.03.02 Kelaikan Keamanan	RAK.03.02.01 Asesmen Sistem Manajemen Keamanan Informasi
	Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	RAK.03.02.02 Asesmen Cyber Security Maturity
		RAK.03.02.03 Sertifikasi Infrastruktur <i>International Standardization Organization</i> (ISO)

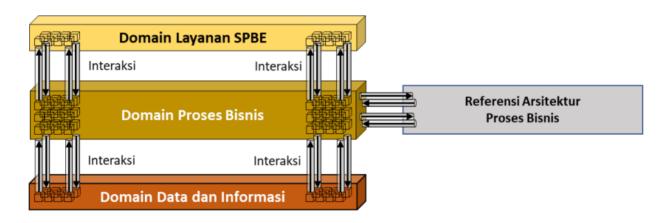
BAB III

DOMAIN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik, domain arsitektur memiliki peran penting. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat 6 (enam) komponen domain yang saling terkait, yaitu Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Setiap domain arsitektur memiliki hubungan referensial dan fungsional dengan domain lainnya. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga memiliki metadata arsitektur yang berfungsi sebagai model terstruktur untuk menggambarkan hubungan antardomain tersebut. Integrasi yang baik antar setiap domain akan meningkatkan kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta mendukung tercapainya inisiatif strategis Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

A. Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri atas berbagai macam proses bisnis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berfungsi untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta membantu dalam mendefinisikan layanan.



Gambar 3.1 Keterkaitan Antar Domain - Relasi langsung pada Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berelasi secara langsung dengan domain arsitektur layanan dan domain arsitektur data dan informasi. Relasi ini menggambarkan domain arsitektur proses bisnis dapat mendukung domain arsitektur layanan, serta domain arsitektur data dan informasi sebagai sumber data dan informasi.

Tabel 3.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi	Referensi Arsitektur Proses Bisnis				
Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait	
Pendidikan	[DAB27] Penyelenggara- an Pendidikan Berbasis Teknologi	Proses bisnis terkait layanan pendidikan dan penyedian konten digital	06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	06.01 Pendidikan	06.01.01 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	06.01.01.01 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 06.01.01.02 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal 06.01.01.03 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi	[DAD27] [DAL27]
					06.01.02 Pengelolaan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,	06.01.02.01 Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 06.01.02.02 Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis		Referensi Arsitektur Proses Bisnis				
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait	
					dan Pendidikan Menengah	06.01.02.03 Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	
					06.01.03 Pengelolaan	06.01.03.01 Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal	
					Pendidikan Non Formal	06.01.03.02 Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal	
						06.01.03.03 Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal	
					06.01.04 Pengelolaan	06.01.04.01 Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
					Pendidikan Tinggi	06.01.04.02 Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi	
						06.01.04.03 Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
						06.01.04.04 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
						06.01.04.05 Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	rensi Arsitektur	Proses Bisnis	Kode Domain
·	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					06.01.05 Pengelolaan dan	06.01.05.01 Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan	
					Pengembang- an Substansi Pendidikan	06.01.05.02 Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional	
						06.01.05.03 Pengelolaan Konten Digital Pendidikan	
					06.01.06 Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan	06.01.06.01 Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal	
						06.01.06.02 Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
						06.01.06.03 Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	
						06.01.06.04 Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	ensi Arsitektur	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
Kebudayaan	[DAB35] Penyeleng- garaan	enyeleng- terkait araan layanan	08. Budaya dan Agama	08.02 Kebudayaan	08.02.01 Pengelolaan Bidang	08.02.01.01 Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	
	Kebudayaan				Kebudayaan	08.02.01.02 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
		kesastraan				08.02.01.03 Pengelolaan Lembaga Kebudayaan	[DAD35]
					08.02.02 Pengelolaan Bidang	08.02.02.01 Pengelolaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[DAL30]
					Kebahasaan dan Kesastraan	08.02.02.02 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan	
						08.02.02.03 Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan	
Pemerintahan Umum	Penyelenggara-	pengangga- ran, pengadaan	09. Pemerintahan Umum	09.02 Keuangan	09.02.03 Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	09.02.03.01 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAD29] [DAL28]
		barang dan jasa, pengelolaan barang			09.02.04 Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	09.02.04.01 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	rensi Arsitektur :	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
		milik negara, dan keuangan negara lainnya			09.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	09.02.06.01 Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					09.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran	09.02.07.01 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran	
					09.02.08 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	09.02.08.01 Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
					09.02.09 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	09.02.09.01 Pengelolaan Revisi Anggaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
					09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	09.02.11.01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refer	ensi Arsitektur I	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
	[DAB30] Penyelenggara- an Layanan Perencanaan	Proses bisnis terkait perencanaan pembangunan		09.05 Perencanaan Pembangu- nan Nasional	09.05.01 Perencanaan Pembangunan	09.05.01.01 Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.05.01.02 Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAD30] [DAL28]
					0 00	09.05.02.01 Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
	[DAB31] Penyelenggara- an Layanan Aparatur	Proses bisnis terkait kearsipan, kepegawaian,		09.06 Aparatur Negara	09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana	09.06.01.01 Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAD31] [DAL28]
	Negara	pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan			09.06.02 Penataan Sistem Kelembagaan	09.06.02.01 Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		administrasi pemerintahan lainnya			09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	09.06.03.01 Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	rensi Arsitektur	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja 09.06.05 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	09.06.04.01 Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.06.04.02 Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.06.04.03 Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.06.05.01 Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan 09.06.05.02 Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan 09.06.05.03 Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	

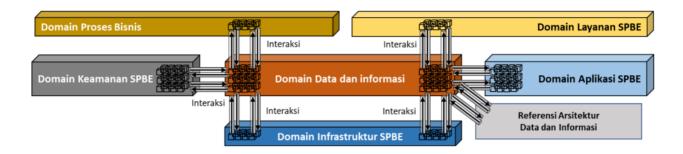
Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	rensi Arsitektur	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					09.06.06 Penyelengga- raan Kearsipan 09.07.02	09.06.06.01 Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.07.02.01 Pengelolaan Kebijakan	
					Pengelolaan Bidang	dan Peraturan Perundang- undangan	
					Hukum	09.07.02.02 Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian	
					09.07.03 Penyelengga- raan Koordinasi Kerja Sama	09.07.03.01 Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dalam Negeri	
					dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	09.07.03.02 Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Luar Negeri	
					09.07.05 Penyelengga- raan Kerumah- tanggaan,	09.07.05.01 Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	rensi Arsitektur	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					Keprotokolan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	09.07.05.02 Pengelolaan Keprotokolan Kementerian	
Satu Data Indonesia	[DAB32] Pengelolaan Data Statistik	Proses bisnis terkait manajemen data statistik	09. Pemerintahan Umum	09.03 Informasi	09.03.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat	09.03.01.01 Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAD01-34] [DAL29]
					Informatika	09.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						09.03.01.03 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						09.03.01.04 Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
					09.03.02 Penatakelola- an Aplikasi Informatika	09.03.02.01 Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
						09.03.02.02 Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi		Refe	rensi Arsitektur	Proses Bisnis	Kode Domain
	Proses Bisnis	Proses Bisnis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
						09.03.02.03 Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan	
						09.03.02.04 Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan	
					09.03.03 Pengelolaan	09.03.03.01 Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan	
					Informasi Publik	09.03.03.02 Penyebarluasan Data dan Informasi Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
					09.03.04 Pengelolaan Data Statistik	09.03.04.01 Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
						09.03.04.02 Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
						09.03.04.03 Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
					09.04.02 Pengelolaan Komunikasi Publik	09.04.01.01 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat	

B. Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan, serta diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi.



Gambar 3.2 Keterkaitan Antar Domain - Relasi langsung pada Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berelasi secara langsung dengan Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relasi ini menggambarkan Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai sumber data dan informasi untuk menjalankan Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai tempat penyimpanan data, dan Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wadah penyebarluasan atau akses data dan informasi, serta Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memastikan mekanisme pengamanan data dan informasi diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.

Tabel 3.2 Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Serbasis	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Kebijakan	Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
Pendidikan	[DAD27] Data dan Informasi Pendidikan	Data layanan pendidikan dan penyediaan konten digital	06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	06.01 Data Pendidikan	06.01.01 Data Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 06.01.01.02 Data Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal 06.01.01.03 Data Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	[DAA07] [DAI01-03] [DAK01-03]	

	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem	Referensi <i>I</i>	Arsitektur Data	Sistem Pemerintah	an Berbasis Elektronik	Kode Domain
Kebijakan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					06.01.02 Data Pengelolaan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	06.01.02.01 Data Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 06.01.02.02 Data Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 06.01.02.03 Data Pengelolaan Badan Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan	

	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem	Referensi <i>l</i>	Arsitektur Data	Sistem Pemerintal	nan Berbasis Elektronik	Kode Domain
Kebijakan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					06.01.03 Data Pengelolaan Pendidikan Non	06.01.03.01 Data Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal	
					Formal	06.01.03.02 Data Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal	
						06.01.03.03 Data Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal	
					06.01.04 Data Pengelolaan Pendidikan Tinggi	06.01.04.01 Data Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
						06.01.04.02 Data Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi	
						06.01.04.03 Data Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	

	Domain Arsitektur Data Sistem	Deskripsi Data Sistem	Referensi A	Arsitektur Data	Sistem Pemerintah	an Berbasis Elektronik	Kode Domain
Kebijakan	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
						06.01.04.04 Data Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 06.01.04.05 Data Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi	
					06.01.05 Data Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan	06.01.05.01 Data Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan	
					rendidikan	06.01.05.02 Data Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional	
						06.01.05.03 Data Pengelolaan Konten Digital Pendidikan	

	Domain Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Sis	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Kebijakan			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
					06.01.06 Data Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Satuan Pendidikan	Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal O6.01.06.02 Data Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Tinggi O6.01.06.03 Data Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah O6.01.06.04 Data Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi		

	Domain Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	rsitektur Data Sistem Pemerintahan Rerbasis	Referensi	Kode			
Kebijakan			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
Kebudayaan	[DAD35] Data dan Informasi Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan	Data layanan kebudayaan, kebahasaan, dan kesastraan	08 Informasi Budaya dan Agama	08.02 Data Kebudayaan	08.02.01 Data Pengelolaan Bidang Kebudayaan 08.02.02 Data Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	08.02.01.01 Data Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya 08.02.01.02 Data Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan 08.02.01.03 Data Pengelolaan Lembaga Kebudayaan 08.02.02.01 Data Pengelolaan Program Pengelolaan Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 08.02.02.02 Data Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan	[DAB35] [DAL30] [DAA10] [DAI01-03] [DAK01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
						08.02.02.03 Data Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan	
Pemerinta- han Umum	[DAD29] Data dan Informasi Penganggaran		09. Informasi Pemerintahan Umum		09.02.03 Data Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	09.02.03.01 Data Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAB31] [DAL28] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]
	negara, da keuangan lainnya Data dan informasi perencana pembangu Data dan informasi kearsipan	3			09.02.04 Data Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	09.02.04.01 Data Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		perencanaan pembangunan			09.02.06 Data Pengelolaan Kekayaan Negara	09.02.06.01 Data Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

	Domain Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
Kebijakan			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
		pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan			09.02.07 Data Monitoring dan Evaluasi Anggaran 09.02.08 Data	09.02.07.01 Data Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran 09.02.08.01 Data	
		lainnya			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
					09.02.09 Data Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	09.02.09.01 Data Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	
					09.02.11 Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAB.09.02.11.01 Data Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
Kebijakan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
	[DAD30] Data dan Informasi Perencanaan			09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	09.05.01 Data Perencanaan Pembangunan	09.05.01.01 Data Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.05.01.02 Data Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					09.05.02 Data Penganggaran Pembangunan	09.05.02.01 Data Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
	[DAD31] Data dan Informasi Aparatur Negara			09.06 Data Aparatur Negara	09.06.01 Data Penataan Sistem Tata Laksana	09.06.01.01 Data Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

	Domain Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Data Deskripsi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Flektronik	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Kebijakan			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
					09.06.02 Data Penataan Sistem Kelembagaan	09.06.02.01 Data Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
					09.06.03 Data Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	09.06.03.01 Data Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
					09.06.04 Data Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan,	09.06.04.01 Data Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
					dan Akuntabilitas Kinerja	09.06.04.02 Data Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		

	Domain Arsitektur Data	Sistem nerintahan Berbasis Deskripsi Data Sistem Pemerintahan Berbasis Flektronik	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Kebijakan	Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
					09.06.05 Data Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	09.06.04.03 Data Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 09.06.05.01 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan 09.06.05.02 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan 09.06.05.03 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan 09.06.05.03 Data Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan		

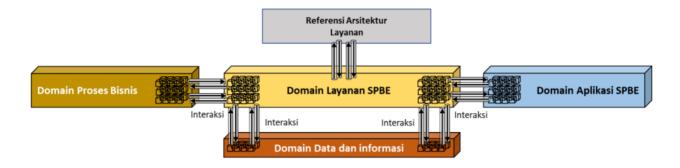
	Domain Arsitektur Data Sistem	Sistem	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Kebijakan	Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
					09.06.06 Data Penyelenggaraan Kearsipan	09.06.06.01 Data Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
					09.07.02 Pengelolaan Bidang Hukum	09.07.02.01 Data Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan		
						09.07.02.02 Data Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
					5 00	09.07.03.01 Data Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dalam Negeri		
					Perjalanan Dinas Luar Negeri	09.07.03.02 Data Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan,		

	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem	Referensi A	Referensi Arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
Kebijakan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	than Berbasis	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
						Kebudayaan, Riset dan Teknologi Luar Negeri		
					09.07.05 Data Penyelenggaraan Kerumahtangga- an, Keprotokolan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	09.07.05.01 Data Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
						09.07.05.02 Data Pengelolaan Keprotokolan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
Satu Data Indonesia	[DAD32] Data Statistik	Data dan informasi terkait manajemen data statistik	09. Pemerintahan Umum	09.03 Data Informasi	09.03.01 Data Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	09.03.01.01 Data Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAB32] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] DAK01-03]	
						09.03.01.02 Data Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		

	Domain Arsitektur Data	Deskripsi Data Sistem	Referensi A	Arsitektur Data	Sistem Pemerintal	han Berbasis Elektronik	Kode Domain
Kebijakan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
						09.03.01.03 Data Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						09.03.01.04 Data Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
					09.03.02 Data Penatakelolaan Aplikasi Informatika	09.03.02.01 Data Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
						09.03.02.02 Data Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan	
						09.03.02.03 Data Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan	
						09.03.02.04 Data Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan	

	Domain Arsitektur Data Sistem	Deskripsi Data Sistem	Referensi A	Arsitektur Data	Sistem Pemerintah	an Berbasis Elektronik	Kode Domain
Kebijakan	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Arsitektur Terkait
					09.03.03 Data Pengelolaan Informasi Publik	09.03.03.01 Data Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan 09.03.03.02 Data Penyebarluasan Data Kebudayaan, Kebahasaan dan	
					09.03.04 Pengelolaan Data Statistik	Kesastraan 09.03.04.01 Data Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
						09.03.04.02 Data Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
						09.03.04.03 Data Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	

C. Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundangundangan terkait dengan layanan pemerintah. Untuk itu, Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat.



Gambar 3.3 Keterkaitan Antar Domain - Relasi langsung pada Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berelasi secara langsung dengan Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Domain Arsitektur Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relasi menggambarkan Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disediakan harus sesuai dengan Domain Arsitektur Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan, Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wadah untuk mendukung dan merealisasikan berbagai layanan elektronik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta untuk mendukung layanan yang baik diperlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.3 Domain Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

	Domain	Deskripsi	Referensi Ar				
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
Pendidikan	[DAL27] Layanan Pendidikan	Layanan pendidikan dan layanan penyediaan konten digital	01. Layanan Publik	01.31 Pendidikan	01.31.01 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01.31.01.01 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 01.31.01.02 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal 01.31.01.03 Layanan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan	[DAB27] [DAD27] [DAA07]
					01.31.02 Layanan Pengelolaan Pendidikan Formal pada	01.31.02.01 Layanan Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	

	Domain	Deskripsi	Referensi Ars	itektur Layana	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	77. 1
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
					Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	01.31.02.02 Layanan Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 01.31.02.03 Layanan	
						Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	
					01.31.03 Layanan Pengelolaan Pendidikan Non	01.31.03.01 Layanan Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal	
					Formal	01.31.03.02 Layanan Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal	

	Domain Arsitektur	Deskripsi	Referensi Ars	sitektur Layana	an Sistem Pemeri	ntahan Berbasis Elektronik	
Kebijakan	Larraman Sistam	Lawanan Sistam	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
						01.31.03.03 Layanan Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal	
					01.31.04 Layanan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	01.31.04.01 Layanan Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
					11881	01.31.04.02 Layanan Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi	
						01.31.04.03 Layanan Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
						01.31.04.04 Layanan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
						01.31.04.05 Layanan Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi	

	Domain	n Berbasis	Referensi Ars	sitektur Layan	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	77 - 4 -
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
					01.31.05 Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan	dan Standar Pendidikan 01.31.05.02 Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional	
						01.31.05.03 Layanan Pengelolaan Konten Digital Pendidikan	
					01.31.06 Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan	01.31.06.01 Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal	
						01.31.06.02 Layanan Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada	

	Domain	Deskripsi	Referensi Ar	sitektur Layan:	an Sistem Pemer	intahan Berbasis Elektronik	4
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Lawanan Sistem	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
						Pendidikan Tinggi	
						01.31.06.03 Layanan Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 01.31.06.04 Layanan Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi	
Kebudayaan	[DAL30] Layanan Kebudayaan	Layanan kebudayaan, kebahasan, dan kesastraan		01.42 Kebudayaan	01.42.01 Pengelolaan Bidang Kebudayaan	01.42.01.01 Layanan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya 01.42.01.02 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan 01.42.01.03 Layanan Pengelolaan Lembaga	[DAB35] [DAD35] [DAA07]

	Domain	Deskripsi	Referensi Ars	sitektur Layan	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
					01.42.02 Pengelolaan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	Kebudayaan 01.42.02.01 Layanan Pengelolaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 01.42.02.02 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan 01.42.02.03 Layanan Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan	
						Kesastraan Kesastraan	

	Domain	Deskripsi	Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait	
Pemerintahan Umum		Layanan terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan keuangan negara lainnya	02. Layanan Administrasi Pemerintahan	02.02 Keuangan	02.02.03 Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara 02.02.04 Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara 02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	02.02.03.01 Layanan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 02.02.04.01 Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 02.02.06.01 Layanan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAB29] [DAD29] [DAA08]	

	Domain	Deskripsi	Referensi Ar	sitektur Layan	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	Kode
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
					02.02.07 Monitoring dan Evaluasi Anggaran	02.02.07.01 Layanan Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran	
					02.02.08 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	02.02.08.01 Layanan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
					02.02.09 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	02.02.09.01 Layanan Pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	
					02.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	02.02.11.01 Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		Layanan		02.03	02.03.01	02.03.01.01 Layanan	[DAB30]

	Domain	Deskripsi	Referensi Ar	sitektur Layana	ın Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
		terkait perencanaan pembangunan		Perencanaan Pembangu- nan Nasional	Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 02.03.01.02 Layanan Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	[DAD30] [DAA08]
					02.03.02 Penganggaran Pembangunan	Teknologi 02.03.02.01 Layanan Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
		Layanan terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan		02.04 Aparatur Negara	Tata Laksana 02.04.02	02.04.01.01 Layanan Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 02.04.02.01 Layanan Pengelolaan dan Penataan	[DAB31] [DAD31] [DAA08]

	Domain	Deskripsi	Referensi Ars	sitektur Layan	an Sistem Pemer	ntahan Berbasis Elektronik	4
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
		layanan			Kelembagaan	Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					02.04.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	02.04.03.01 Layanan Pengelolaan Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					02.04.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi,	02.04.04.01 Layanan Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	02.04.04.02 Layanan Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
						02.04.04.03 Layanan Pengelolaan Pemantauan	

	Domain	Deskripsi	Referensi Ar	sitektur Layan	an Sistem Pemer	intahan Berbasis Elektronik	4
Kebijakan		Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
						dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					02.04.05 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	02.04.05.01 Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan	
						02.04.05.02 Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebudayaan	
						02.04.05.03 Layanan Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	

	Domain	Deskripsi	Referensi Ars	sitektur Layan	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Lavanan Sistem	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
					02.04.06 Penyelenggara- an Kearsipan	02.04.06.01 Layanan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					02.05.02 Layanan Pengelolaan Bidang Hukum	02.05.02.01 Layanan Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan	
						02.05.02.02 Layanan Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian	
					02.05.03 Penyelenggara- an Koordinasi Kerja Sama dan Penanganan	02.05.03.01 Layanan Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dalam Negeri	

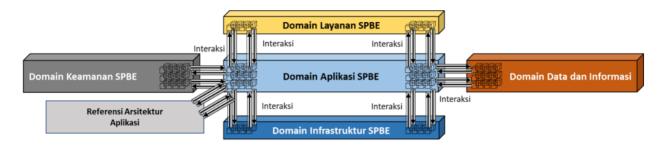
	Domain	Deskripsi	Referensi Ar	sitektur Layan	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	4
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Lawanan Sistem	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
					Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri 02.05.05 Penyelenggara- an Kerumah- tanggaan, Keprotokolan	02.05.03.02 Layanan Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Luar Negeri 02.05.05.01 Layanan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian	
					dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	02.05.05.02 Layanan Pengelolaan Keprotokolan Kementerian	
Satu Data Indonesia	[DAL29] Layanan Portal Satu Data Indonesia	Layanan terkait manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	01. Layanan Publik	01.43 Informasi	01.43.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	01.43.01.01 Layanan Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 01.43.01.02 Layanan Pengelolaan Infrastruktur	[DAB32-34] [DAD32-34] [DAA09]

	Domain		Referensi Ars	sitektur Layana	an Sistem Pemerii	ntahan Berbasis Elektronik	77 - 4 -
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
						Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						01.43.01.03 Layanan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						01.43.01.04 Layanan Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
					01.43.02 Penatakelolaan Aplikasi Informatika	01.43.02.01 Layanan Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
						01.43.02.02 Layanan Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan	
						01.43.02.03 Layanan Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan	

	Domain	Deskripsi	Referensi Ars	sitektur Layana	an Sistem Pemerin	tahan Berbasis Elektronik	77. 1
Kebijakan	Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Lawanan Sistem	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
						01.43.02.04 Layanan Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan	
					01.43.03 Pengelolaan Informasi Publik	01.43.03.01 Layanan Penyebarluasan Data dan Informasi Pendidikan	
						01.43.03.02 Layanan Penyebarluasan Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
					01.43.04 Pengelolaan Data Statistik	01.43.04.01 Layanan Pendataan Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
						01.43.04.02 Layanan Penyajian Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	

	Domain Deskripsi		Referensi Ars	itektur Layana	ın Sistem Pemerir	ntahan Berbasis Elektronik	Kode
Kebijakan	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
						01.43.04.03 Layanan Interoperabilitas Data Pendidikan, Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	
					01.44.02 Pengelolaan Komunikasi Publik	01.44.02.01 Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat	

D. Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat mengakomodasi fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan.



Gambar 3.4 Keterkaitan Antar Domain - Relasi Langsung pada Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berelasi secara langsung dengan domain arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relasi ini menggambarkan Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus didukung oleh kontrol keamanan pada Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dapat mendukung layanan yang terintegrasi, dan sebagai wadah untuk penyebarluasan atau akses data dan informasi.

Tabel 3.4 Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kebijakan	Domain	Deskripsi	Referensi	Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait		
Pendidikan	[DAA07] Aplikasi Pendidikan	Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan konten digital	02 Aplikasi Khusus	02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	02.02.01 Komponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	02.02.01.01 Subkomponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 02.02.01.02 Subkomponen Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Non Formal 02.02.01.03 Subkomponen Pengelolaan Pendidik dan	[DAD27] [DAL27] [DAI01-03] [DAK01-03]		
					02.02.02 Komponen Pengelolaan Pendidikan Formal pada	Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi 02.02.02.01 Subkomponen Pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah			

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi	Arsitektur Ap	likasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode
	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
Pendidikan	[DAA07] Aplikasi Pendidikan	Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan konten digital	02 Aplikasi Khusus	02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 02.02.02 Komponen Pengelolaan Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	02.02.02.02 Subkomponen Pengelolaan Peserta Didik untuk Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 02.02.02.03 Subkomponen Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan	
					02.02.03 Komponen Pengelolaan	Pendidikan Menengah 02.02.03.01 Subkomponen Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi	Referensi Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait		
					Pendidikan Non Formal	02.02.03.02 Subkomponen Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Non Formal			
						02.02.03.03 Subkomponen Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal			
Pendidikan		Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan	02 Aplikasi Khusus	02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	02.02.04 Komponen Pengelolaan Pendidikan Tinggi	02.02.04.01 Subkomponen Pengelolaan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi			
		konten digital			86-	02.02.04.02 Subkomponen Pengelolaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi			
						02.02.04.03 Subkomponen Pengelolaan Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Pendidikan Tinggi			

Kebijakan	Domain	Deskripsi	Referensi	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	77 - 1 -
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
						02.02.04.04 Subkomponen Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
						02.02.04.05 Subkomponen Pengelolaan Riset dan Teknologi pada Pendidikan Tinggi	
					02.02.05 Komponen Pengelolaan dan Pengembangan	02.02.05.01 Subkomponen Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan	
					Substansi Pendidikan	02.02.05.02 Subkomponen Pengelolaan dan Pengembangan Perbukuan Nasional	
						02.02.05.03 Subkomponen Pengelolaan Konten Digital Pendidikan	
Pendidikan	[DAA07] Aplikasi Pendidikan	l -	02 Aplikasi Khusus	02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	02.02.06 Komponen Penjaminan Mutu dan	02.02.06.01 Subkomponen Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi	Arsitektur Ap	likasi Sistem Per	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode
	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
		penyediaan konten digital			Akreditasi Pendidikan	Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal	
						02.02.06.02 Subkomponen Pengelolaan Penjaminan Mutu, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan pada Pendidikan Tinggi	
						02.02.06.03 Subkomponen Pengelolaan Akreditasi Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	
						02.02.06.04 Subkomponen Pengelolaan Akreditasi pada Pendidikan Tinggi	
Kebudayaan	[DAA10] Aplikasi Kebudayaan	layanan kebudayaan, kebahasaan,	02 Aplikasi Khusus	02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	02.02.07 Komponen Pengelolaan Bidang	02.02.07.01 Subkomponen Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	[DAD35] [DAL30] [DAI01-03] [DAK01-03]
		dan kesastraan			Kebudayaan	02.02.07.02 Subkomponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Per	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	m Pemerintahan	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	
						02.02.07.03 Subkomponen Pengelolaan Lembaga Kebudayaan	
					02.02.08 Komponen Pengelolaan Bidang Kebahasaan	02.02.08.01 Subkomponen Pengelolaan Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	
					dan Kesastraan	02.02.08.02 Subkomponen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan	
						02.02.08.03 Subkomponen Pengelolaan Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan	
Pemerintahan Umum	[DAA08] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	perencanaan, penganggaran, keuangan, kearsipan, kepegawaian,	01. Aplikasi Umum	01.02 Aplikasi Administrasi Pemerinta- han	01.02.01 Komponen Pengelolaan Penerimaan dan Pendapatan Negara	01.02.01.01 Subkomponen Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[DAD28-31] [DAL28] [DAI01-03] [DAK01-03]
		pengelolaan barang milik			01.02.02 Komponen	01.02.02.01 Subkomponen Pengelolaan Keuangan dan	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi .	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode
	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
		negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya			Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	Perbendaharaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
			layanan administrasi pemerintahan		01.02.03 Komponen Pengelolaan Kekayaan Negara	01.02.03.01 Subkomponen Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					01.02.04 Komponen Monitoring dan Evaluasi Anggaran	01.02.04.01 Subkomponen Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran	
					01.02.05 Komponen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	01.02.05.01 Subkomponen Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
					01.02.06 Komponen Perubahan Anggaran Pendapatan	01.02.06.01 Subkomponen Pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran	

Kebijakan	Domain	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi .	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Pen	Kode	
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
					dan Belanja Negara dan Revisi Anggaran		
					01.02.07 Komponen Perencanaan	01.02.07.01 Subkomponen Perencanaan Sasaran Strategis Kementerian	
					Pembangunan	01.02.07.02 Subkomponen Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					01.02.08 Komponen Penganggaran Pembangunan	01.02.08.01 Subkomponen Pengelolaan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					01.02.09 Komponen Penataan	01.02.09.01 Subkomponen Pengelolaan Tata Laksana Kementerian Pendidikan,	
					Sistem Tata Laksana	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Kebijakan	Domain	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi .	Arsitektur Ap	likasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	77 - 4 -
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Kode Domain Arsitektur Terkait
					O1.02.10 Komponen Penataan Sistem Kelembagaan O1.02.11 Komponen Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	01.02.10.01 Subkomponen Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 01.02.11.01 Subkomponen Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 01.02.11.02 Subkomponen Pengelolaan Pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 01.02.11.03 Subkomponen Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kinerja Kementerian	
					01.02.12 Komponen Penyelengga- raan Kearsipan	01.02.12.01 Subkomponen Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan Kementerian	

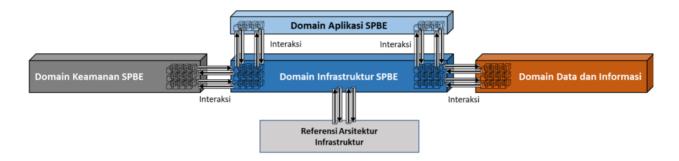
Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi .	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait	
						Riset, dan Teknologi	
					01.02.13 Komponen Pengelolaan Bidang Hukum	01.02.13.01 Subkomponen Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan	
						01.02.13.02 Subkomponen Penanganan Perkara dan Advokasi Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
					01.02.14 Komponen Penyelengga- raan Koordinasi Kerja Sama dan Penanganan Administrasi Perjalanan	01.02.14.01 Subkomponen Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dalam Negeri 01.02.14.02 Subkomponen Pengelolaan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Luar Negeri	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi .	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode
	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
					Dinas Luar Negeri		
					01.02.15 Komponen Penyelenggara- an Kerumah- tanggaan, Keprotokolan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	01.02.15.01 Subkomponen Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Sarana Prasarana Kementerian 01.02.15.02 Subkomponen Pengelolaan Keprotokolan Kementerian	
					01.02.16 Komponen Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat	01.02.16.01 Subkomponen Pengelolaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian	
					Informatika	01.02.16.02 Subkomponen Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						01.02.16.03 Subkomponen Pengelolaan Aplikasi	

Kebijakan	Domain Arsitektur	Deskripsi Aplikasi Sistem	Referensi .	Arsitektur Apl	ikasi Sistem Pen	nerintahan Berbasis Elektronik	Kode
	Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
						Teknologi Informasi dan Komunikasi	
						01.02.16.04 Subkomponen Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
					01.02.17 Komponen Penatakelolaan	01.02.17.01 Subkomponen Penatakelolaan Aplikasi Khusus Kementerian	
					Aplikasi Informatika	01.02.17.02 Subkomponen Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan	
						01.02.17.03 Subkomponen Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebudayaan	
						01.02.17.04 Subkomponen Pengelolaan Akun Akses Layanan Kebahasaan dan Kesastraan	
					01.02.18 Komponen	01.02.18.01 Subkomponen Penyebarluasan Data dan	

Kebijakan	Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi	Kode			
			Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Domain Arsitektur Terkait
					Pengelolaan	Informasi Pendidikan	
					Informasi Publik	01.02.18.02 Subkomponen Penyebarluasan Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	

E. Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendeskripsikan kerangka dasar pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menghasilkan layanan.



Gambar 3.5 Keterkaitan Antar Domain - Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berelasi secara langsung dengan Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relasi ini menggambarkan bahwa Domain Arsitektur Infrastruktur Pemerintahan Berbasis Elektronik harus dilindungi oleh kontrol keamanan pada Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis sebagai dijalankannya Elektronik juga berperan tempat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tercakup dalam Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta sebagai tempat penyimpanan data dan informasi pada Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menghasilkan layanan.

Tabel 3.5 Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

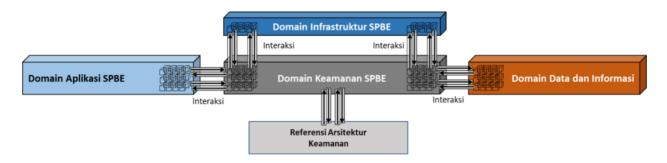
Domain Arsitektur		Referensi Arsitektur I	nfrastruktur Sistem	Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait
Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi,	01. Fasilitas Komputasi	01.01 Pusat Data Nasional	01.01.01 Pusat Data Instansi Pusat Pemerintah	[DAD01-43] [DAA01-09]
	berupa infrastruktur Pusat Data Nasional,		Komputasi	01.02.01 Pusat Komputasi <i>On Premise</i>	[DAK01-03]
	pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur			01.02.02 Pusat Komputasi Awan Pihak Ketiga	
	berbagi pakai yang			01.02.03 Fasilitas Komputasi	
	apat dimanfaatkan oleh eluruh Instansi pusat an Pemerintah Daerah			01.03.01 Network Operations Center	
				01.03.02 Data Operation Center	
				01.03.03 Command/Operation Center	
				01.03.04 Security Operation Center	
				01.03.05 Emergency Operation Center	
[DAI02] Sistem Integrasi	Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra	02. Sistem Integrasi	02.01 Jaringan Intra Pemerintah	02.01.01 Jaringan Intra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]

Domain		Referensi Arsitektur I	nfrastruktur Sistem	Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait	
	Pemerintah			Teknologi		
	dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat			02.01.02 Jaringan Internet Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat				02.01.03 Perangkat Keras Jaringan		
[DAI02] Sistem Integrasi	dan Pemerintah Daerah	02. Sistem Integrasi	02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	02.02.01 Jaringan Intra Instansi Pemerintah	DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]	
				02.02.02 Sistem Penghubung Layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		
				02.02.03 Interoperabilitas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1	
[DAI03] Platform	Penyelenggaraan platform berupa	03. Platform	03.01 Kerangka Infrastruktur dan	03.01.01 Perangkat Keras Keamanan	[DAD01-34] [DAA01-09]	
	kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi		Aplikasi	03.01.02 Peripheral	[DAK01-03]	
	apinasi dan komputasi			03.01.03 Mobile Device		

Domain		Referensi Arsitektur	Infrastruktur Sistem	Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait
	awan, untuk mewujudkan government cloud, menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah			03.01.04 Perangkat Lunak Platform	
		03.02 Komputasi Awan	•	03.02.01 Platform as a Service (PaaS)	
				03.02.02 Infrastructure as a Service (IaaS)	
				03.02.03 Software as a Service (SaaS)	
				03.02.04 Big Data as a Service (BDaaS)	

F. Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait dengan data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup standar dan acuan dalam pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi untuk melindungi setiap aset dari ancaman dan risiko yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 3.6 Keterkaitan Antar Domain - Relasi langsung pada Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berelasi secara langsung dengan domain arsitektur aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relasi ini menggambarkan Domain Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Domain Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Domain Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan harus dilindungi oleh kontrol keamanan yang tepat dan memadai seperti yang tercakup dalam Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan menciptakan ekosistem yang aman dan andal. Penerapan keamanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilakukan melalui koordinasi dan pemerintah konsultasi dengan lembaga nonkementerian menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Tabel 3.6 Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain		Referensi A	rsitektur Keamanan Sist	em Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait
[DAK01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diacu oleh	01 Standar Keamanan	dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	01.01.01 Keamanan Data dan Informasi	[DAD01-34] [DAA01-09]
	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah			01.01.02 Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	[DAI01-09]
	masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan			01.01.03 Keamanan Sistem Penghubung Layanan	
	fungsi keamanan pada			01.01.04 Keamanan Jaringan Intra	
	data dan informasi, aplikasi Sistem			01.01.05 Keamanan Pusat Data Nasional	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan infrastruktur Sistem			01.01.06 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan persyaratan		01.02 Standar Keamanan Internasional	01.02.01 Referensi Standar Keamanan Internasional	
	keamanan yang telah ditetapkan.		01.03 Regulasi Lainnya	01.03.01 Regulasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				01.03.02 Regulasi Pengelolaan Keamanan	

Domain Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Deskripsi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait	
[DAK02]	Penyelenggaraan		02 Penerapan 02.01		02.01.01 Sosialisasi Keamanan	[DAD01-34]
Penerapan	keamanan Sistem	Keamanan		Informasi	[DAA01-09]	
Keamanan	Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	,	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	02.01.02 Peningkatan Kesadaran	[DAI01-09]	
				Keamanan Informasi (Information Security Awareness)		
			02.02 Identifikasi Kerentanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	02.02.01 Penilaian Kerentanan dan Risiko Keamanan		
				02.02.02 Pengujian Kerentanan dan Risiko Keamanan		
				02.02.03 Analisis Kerentanan dan Risiko Keamanan		
				02.02.04 Penanganan Kerentanan dan Risiko Keamanan		
			02.03 Peningkatan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	02.03.01 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi		
				02.03.02 Peningkatan Teknologi Keamanan Informasi		
				02.03.03 Penguatan Tata Kelola Keamanan Informasi		

Domain	Deskripsi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait
			02.04 Penanganan Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan	02.04.01 Identifikasi Penanganan Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Berbasis Elektronik	02.04.02 Proteksi Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
				02.04.03 Deteksi Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
				02.04.04 Respon Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
				02.04.05 Pemulihan Insiden Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Sistem Pemerintahan	02.05.01 Audit Keamanan Infrastruktur	
			Berbasis Elektronik	02.05.02 Audit Keamanan Aplikasi	
				02.05.03 Evaluasi Tingkat Maturitas Penanganan Insiden	

Domain	Deskripsi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Referensi Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Arsitektur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Kode Domain Arsitektur Terkait
[DAK03] Kelaikan	Pemberian rekomendas kelaikan keamanan	03 Kelaikan Keamanan	03.01 Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum 03.02 Kelaikan Keamanan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	03.01.01 Pengujian Kerentanan Internal	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]
Pemerintahan Ber Elektronik dan infrastruktur Siste Pemerintahan Ber	Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis			03.01.02 Pengujian Kerentanan Eksternal	
	infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional.			03.02.01 Asesmen Sistem Manajemen Keamanan Informasi	
				03.02.02 Asesmen Cyber Security Maturity	
				03.02.03 Sertifikasi Infrastruktur International Standardization Organization (ISO)	

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

jdih.kemdikbud.go.id